



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
  11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

#### Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
  - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
  - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
  - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
  - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
  - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal        Agustus 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
Pada tanggal        Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



WARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2026**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini memuat kondisi umum, isu- isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 untuk yang akan datang. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Provinsi Sumatera Barat , APBN, maupun Sumber Pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Demikianlah semoga RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat berguna bagi kita semua

Painan, Agustus 2025  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**AGUSTINA MAMADANI, S.ST.MM**  
NIP. 19790810 200312 2 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU .....	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2026.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN .....	88
BAB V PENUTUP .....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 126 s/d Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja berupa dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran, sekaligus merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan demikian dokumen awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahun berjalan. Serangkaian proses ini diharapkan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 memiliki sinergitas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah atau Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tersebut menjadi Dokumen Pelaksanaan akan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 juga merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Dinas

Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang mendukung Visi Bupati Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yaitu : **“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”** Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Misi Bupati Pesisir Selatan yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan adalah **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**

## **I.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan tahun anggaran 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
  10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah; 3)
5. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN,**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan realisasi Renstra Doinas kesehatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan dan /atau realisasi APBD Dinas Kesehatan.

Disamping itu juga berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti *SPM*.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

Tujuan dan Sasaran, yaitu perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

yaitu rencana penetapan pagu dana indikatif pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan rencana penetapan pagu indikatif pada tahun yang akan datang (perkiraan maju) yaitu tahun 2027.

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah menganggarkan dana sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 223.383.337.234,- dengan realiasi keuangan sebesar Rp 206.042.154.247,00 atau setara 92,24 % sedangkan realisasi fisik mencapai % yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Anggaran Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp. 72.961.522.414,- dengan realiasi keuangan sebesar Rp. 71.359.093.763,- persentase realiasi keuangan sebesar 97,80% dan realisasi fisik mencapai 100 % .
- b. Anggaran Belanja Seluruh Sub Kegiatan (Non Gaji) sebesar Rp. 150.421.814.820,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.683.060.484,-(8954 %) dan realisasi fisik mencapai 92.24%.

Adapun pada tahun 2024 Dinas Kesehatan telah melaksanakan 5 program, 23 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan  
dan Penacapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d Tahun 2024  
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program( Renstra Perangkat Daerah) tahun2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Kinerja dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten								
1 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah								
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	270,00	62,00	8,00	8,00	100	34,00	104,00	39
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	271,00		54,00	54,00	100	34,00	88,00	32
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	272,00		54,00	54,00	100	23,00	77,00	28
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,00	4,00	4,00	4,00	100	12,00	20,00	67
1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1 02 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan asn	55980	22392	11208	11208	100	11196	44796,00	80
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	36	36,00	36,00	100	12,00	84,00	84
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	60,00		5,00	5,00	100	12,00	17,00	28
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	220,00		43,00	43,00	100	12,00	55,00	25

1	02	01	10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase Tertib Peningkatan Pelayanan BLUD								
1	02	01	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<b>Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayan dan penunjang Pelayanan</b>	<b>20,00</b>	20	20,00	20,00	<b>100</b>	21	61,00	305
1	02	01	2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0,00	
1	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	92,00		23,00	23,00	<b>100</b>	12	35,00	38
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	80,00		30,00	30,00	<b>100</b>	12	42,00	53
1	02	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0,00	
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai perangkat daerah	200,00		50,00	50,00	<b>100</b>	50	100,00	50
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah							0,00	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	80,00	15,00	15,00	15,00	<b>100</b>	15	45,00	56
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100,00	16,00	16,00	16,00	<b>100</b>	0	32,00	32
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5,00	1,00	1,00	1,00	<b>100</b>	1	3,00	60
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10,00	2,00	2,00	2,00	<b>100</b>	2	6,00	60
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,00	3,00	3,00	3,00	<b>100</b>	3	9,00	60

1	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	60,00	12,00	12	12,00	100	12	36,00	60
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,00	105,00	105,00	105,00	100	105	315,00	105
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1000,00		60,00	60,00	100	60	120,00	12
1	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan							0,00	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	80,00		16,00	16,00	100	16	32,00	40
1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan							0,00	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	120,00	24	24,00	24,00	100	24	72,00	60
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60,00	12	12	23,00	192	12	47,00	78
1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik							0,00	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabaran yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1,00		1,00	1,00	100	1	2,00	200
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200,00	20	20,00	20,00	100	20	60,00	30
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100,00	17	20,00	20,00	100	20	57,00	57
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5,00	1	1,00	1,00	100	1	3,00	60
					PENATAAN ORGANISASI								0,00	
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	48,00		12,00	2,00	17	12	14,00	29

1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes							0,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang di rehab							0,00	
						Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan							0,00	
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	10,00					16,00	16,00	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1,00		1,00	1,00	100	1	2,00	200
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	21,00		21,00	21,00	100	21	42,00	200
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	25,00	5,00	15,00	15,00	100	15	35,00	140
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan yang diadakan	10,00	2	20,00	20,00	100	20	42,00	420
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	10,00	2	1,00	1,00	100	2	5,00	50
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	5,00	1	1	1,00	100	1	3,00	60
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	5,00	1	15,00	15,00	100	15	31,00	620
1	02	02	2.01	21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan habis pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	80,00	21	21,00	21,00	100	21	63,00	79
1	03	03	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan	528.147	105.374	0,00	0,00	#DIV/0!		105374,00	20

1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase SPM Kesehatan yang mencapai target							0,00	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47.800	8485	8485	8485	100	11678	28648,00	60
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45.630	8019	8019	8019	100	9547	25585,00	56
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.455	7934	7934	7934	100	9454	25322,00	58
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	213.540	38530	38530	38530	100	46935	123995,00	58
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	406.400	70562	70562	70562	100	11122	152246,00	37
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.299.605	241811	241811	241811	100	241811	725433,00	5
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	249.970	62879	62879	62879	100	72367	198125,00	79
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	542.377	82425	82305	82305	100	360939	525669,00	97
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.387	2058	2057	2057	100	3641	7756,00	75
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	5.000	1000	1000	1061	106	1082	3143,00	63
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.356	5406	5406	5406	100	100	10912,00	31

1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65.745	14626	14626	14626	100	100	29352,00	45
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	50,00	10	10,00	10,00	100	1	21,00	42
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	320,00	80	80,00	80,00	100	1	161,00	50
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300,00	90	100	100,00	100	1	191,00	64
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	200,00	21,00	21,00	21,00	100		42,00	21
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	150,00	6,00	6	6,00	100	1	13,00	9
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250,00	3,00	3	3,00	100	1	7,00	3
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	35,00	7,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1	8,00	23
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120,00	24,00	24,00	24,00	100	1	49,00	41
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	250,00	30,00		0,00	#DIV/0!	0	30,00	12
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	250,00	30,00	55,00	50,00	91	0	80,00	32

1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	250,00	20,00			#DIV/0!	1	21,00	8
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200	82,00	120	120	100	1	203,00	102
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80,00	9,00	10,00	10,00	100	1	20,00	25
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah	3000,00	25,00	50	50,00	100	0	75,00	3
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah spesimen penyakit Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang didistribusikan	105	25,00	25	25	100	100	150,00	143
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	16,00	4,00	4,00	4,00	100	1	9,00	56
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota	22,00	-	22,00	22,00	100	5	27,00	123
1	03	03	2.02	36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan hasil nvestigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		-	12,00	12,00	100	12	24,00	#DIV/0!
1	03	03	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	21,00	2,00			#DIV/0!	1	3,00	14
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	240,00	48			#DIV/0!	48	96,00	40
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Operasional Rumah Sakit	60,00	12			#DIV/0!	1	13,00	22
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Operasional Puskesmas	1050,00	126	126,00	126,00	100	253	505,00	48
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelollan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan an Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam satu sistim penanganan Gawat Darurat terpadu (SPGDT)	1	1			#DIV/0!	0	1,00	100

1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui telemedicine untuk mendapatkan akses pelayann kesehatan yang berkualitas	20,00	1			#DIV/0!	0	1,00	5
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			60,00	60,00	100	60	120,00	#DIV/0!
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar			60,00	60,00	100	60	120,00	#DIV/0!
1	02	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan							0,00	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5,00	1,00	1,00		-	3	4,00	80
1	02	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK							0,00	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah dokumen Hasil Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	10,00	2	2,00	2,00	100	8	12,00	120
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	21		21	21	100	8	29,00	138
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Pukesmas yang mempunyai Tenaga Kesehatan sesuai Standar							0,00	
1	02	03	2.01		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota</b>	Jumlah SDM mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi							0,00	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2722	1.475			#DIV/0!	30	1505,00	55
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumberdaya Manusia Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota</b>	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan							0,00	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusai kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	800	800	800	800	100	800	2400,00	300
1	02	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	269	66	53	53	100	53	172,00	64

1	02	03	2.02		<b>Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Jumlah SDM tingkat daerah yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya							0,00	
1	02	03	2.02	01	Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM tingkat daerah yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1184	120	300	300	100	300	720,00	61
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar							0,00	
						Persentase PIRT yang memenuhi standar							0,00	
1	02	04	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>							0,00	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	150,00	80,00	80	80,00	100	50	210,00	140
1	02	04	2.03		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi IRT Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Makanan dan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT</b>	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)							0,00	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	300,00	60,00	60	60,00	100	50	170,00	57
1	02	04	2.04		<b>penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)</b>	<b>Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)</b>							0,00	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	80,00	20,00			#DIV/0!	50	70,00	88

1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman IRT	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman IRT							0,00	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan sarana produksi makanan-minuman Industri Rumah Tanggar yang Beredar yang dilakukan pemeriksaa post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	80	65,00	80	80,00	100	50	195,00	244
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman IRT</b>							0,00	
1	02	05	2.01		<b>Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota</b>	persentase ketersediaan media promosi							0,00	
1	02	05	2.01	09	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	300,00	60,00	60	60,00	100	12	132,00	44
1	02	05	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase Nagari ber PHBS							0,00	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100,00	30,00	30,00	30,00	100	12	72,00	72
1	02	05	03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>							0,00	
1	02	05	03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80,00		30,00	30,00	100	12	42,00	53

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sampai akhir Desember 2024, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan, dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Melihat pencapaian hasil pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka disusunlah indikator pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan agar hasil yang diharapkan dari tujuan pembangunan kesehatan dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara operasional. Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan periode 2023-2026 setelah dilakukan rasionalisasi / perubahan Rencana Strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja , dengan indikator :
  - a. Nilai AKIB Dinas Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat, dengan indikator :
  - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - c. Prevalensi Stunting
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah , dengan Indikator :
  - a. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,

menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 s/d 2026**

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan										
Tahun 2021 s/d 2026										
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target						Sumber Data Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Dinas Kesehatan				B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	Sekretariat
		Nilai AKIP Dinas Kesehatan				A	A	A	A	Sekretariat
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	(Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup) X 100.000 KH			140	135	130	125	Kabid Kesmas
		Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah kematian / Jumlah kelahiran hidup) X 1000 KH			12	11	11	10	Kabid Kesmas
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)				11,20%	10,60%	10%	9,40%	Kabid Kesmas
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan				100	100	100	100	Kabid Kesmas

**Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Eselon II**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>MISI 1 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan</b>						
<b>MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat</b>						
<b>Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>						
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Kesehatan		A(87)	A(89,68)	103,08
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	2 Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100.000 KH	135	125	107,41
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	11	10	109,09
		4 Prevalensi Stunting (EPPGBM)		7,00%	6,56%	106,29
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	%	100	91	91,00
<b>Rata-rata capaian Indikator 3 Sasaran Strategis : 5 Indikator Kinerja</b>						<b>103,37</b>

Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang menjadi target pembangunan Bidang Kesehatan adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Harapan hidup adalah seberapa lama seseorang diperkirakan hidup berdasarkan usia, jenis kelamin, dan negara

Capaian UHH Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Grafik 2.1

**Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2020 s/d 2024**



Dari grafik di atas, rata-rata UHH Pesisir Selatan selama rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Program peningkatan UHH yang dilaksanakan pemerintah tidak hanya fokus pada bagaimana meningkatkan harapan lama hidup penduduk, namun juga memastikan lansia berumur 70 tahun atau dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, kedepannya diperlukan program-program untuk menjamin agar penduduk yang berumur lanjut memiliki kesehatan yang memadai,

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja) dari 3 (tiga) Sasaran strategis yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan.

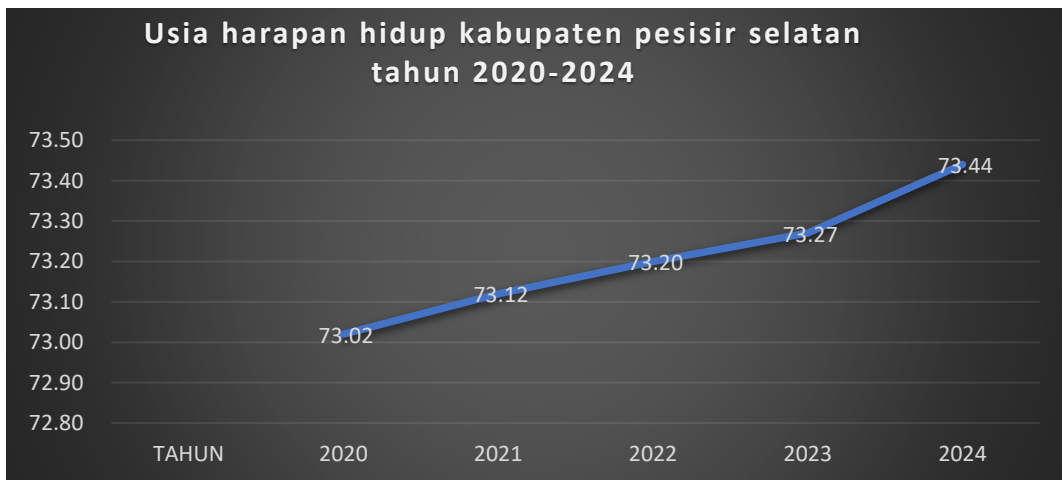
Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	A (87)
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	135/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	11/1.000 KH
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	7,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	100

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2020 sampai tahun 2024, Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada tabel diatas, yaitu :

- a. Usia harapan Hidup terjadi peningkatan dari tahun 2020 s/d 2024 yaitu 73,02 pada tahun 2020 dan 73,34 di tahun 2024.

Gambar 2.1



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

- b. Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2020 s/d 2024 terjadi peningkatan kematian ibu di tahun 2021 yaitu 172/100.000 KH dari tahun 2020 dengan angka 98/100.000 KH, namun pada tahun 2022 s/d tahun 2024 terjadi penurunan angka kematian ibu yaitu 145/100.000 KH pada tahun 2024 , 138/100.000 KH pada tahun 2023 dan di tahun 2024 Angka Kematian Ibu menjadi 125/100.000 KH.

Gambar 2.2



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

- c. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus dari tahun sebelumnya yaitu 11/1.000 KH pada tahun 2023 menjadi 10/1.000 KH pada tahun 2024 dari 7.536 kelahiran hidup.

Gambar 2.3



**Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024**

- d. Prevalensi Stunting

Stunting, kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Dalam jangka panjang stunting akan berdampak terhadap potensi kerugian 2-3% dari GDP per tahun (World Bank, 2016) sebagai akibat menurunnya produktivitas. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Perhitungan data stunting dilakukan melalui dua metode Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan riset kesehatan berbasis komunitas berskala nasional dan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5-6 tahun sekali. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans gizi, pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu, maka pemantauan dan pelaporan status gizi individu telah

dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Data pencapaian prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM memiliki kecenderungan penurunan selama 3 tahun terakhir. Gambar 2.4 menunjukkan datatunting EPPGM menunjukan pada tahun 2020 sebesar 11,8 %, pada tahun 2021 naik 12,3 % , kemudian tahun 2022 turun lagi 7%. Angka di tahun 2023 tetap 7 % dan tahun 2024 turun menjadi 6,65%

Gambar 2.4



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK/ SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi 2025	catatan analisis
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Usia Harapan Hidup				70,86	71,11	71,36	71,61	72,11	73,02	73,12	73,2	73,27	73,34	73,45	
2	Persentase Balita Gizi Buruk				5,51	5,5	5,48	5,46	5,44	5,51	6,4	0,4	0,7	0,9	0,9	
3	Prevalensi balita gizi kurang				7,29	7,8	7,5	7,3	7	7,29	6,4	3,9	5,6	4,9	4,5	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				8/ 1000 KH	8/ 1000 KH	12/ 1000 KH	12/ 1000 KH	11/ 1000 KH	7,47/1.000 KH	7,10/ 1000 KH	9/ 1000 KH	11/ 1000 KH	10/ 1000 KH	9/1000 KH	
5	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup				7,5 1000 KH	7,4/ 1000 KH	7,3/ 1000 KH	7/ 1000 KH	7/ 1000 KH	7,5/ 1000 KH	8/ 1000 KH	10/ 1000 KH	12/ 1000 KH	12,2/ 1000 KH	12/1000KH	
6	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup				5/ 1000 KH	5,2/ 1000 KH	5/ 1000 KH	5/ 1000 KH	4,78/ 1000 KH	5,48/ 1000 KH	4,6/ 1000 KH	6/ 1000 KH	7,5/ 1000 KH	7,1/ 1000 KH	7/1000KH	
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup				105/ 100.000 KH	100/ 100.000 KH	145/ 100.000 KH	135/ 100.000 KH	130/ 100.000 KH	105/ 100.000 KH	172/ 100.000 KH	144/ 100.000 KH	138/ 100.000 KH	125/ 100.000 KH	120/100.000 KH	
8	Rasio posyandu per satuan balita				1 : 53	1:53	1 : 52	1 : 52	1 : 52	1:53	1:64	1:63	1:60	1:83	0,0993056	
9	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,2	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	
10	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				0,095	0,0079	0,0079	0,0099	0,0099	0,0079	0,0063	0,0081	0,000766	0,000751	0,000751	
11	Rasio Dokter per satuan penduduk				0,206	0,216	0,226	0,236	0,256	0,095	0,022	0,011	0,09	0,018	0,018	
12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk				0,206	0,216	0,226	0,236	0,256	0,206	0,028	0,024	0,017	0,018	0,018	
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				107,13%	80,00%	80,00%	82,00%	82,00%	107,13	128,7	132	108,2	105,13	105,13	
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				89,90%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%	89,9	88,8	91,5	93,1	89,9	89,9	

15	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI)				73,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	73	49	65,9	84,1	88,3	88,3	
16	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				85,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	85	62,6	98	90,1	67	90	
19	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk				5,01	2	2	2	2	5,01	2,1	6	4,9	9,4	9,4	
20	Cakupan balita pneumonia yang ditangani				52%	100%	100%	100%	100%	52,49%	30,70%	49,00%	59,40%	30,11%	30,11%	
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				14,25	100	100	100	100	14,25	63,8	82	73,7	65	95	
22	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)				157,15	1000	1000	1000	1000	157,15	178	264	269	275	275	
23	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)				3,9	5	5	5	5	3,9	3,9	4,7	5,3	2,9	2,9	
24	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS				48,64	100	100	100	100	114,6	109,6	103,6	79,9	48,64	48,64	
25	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS				84%	100%	100%	100%	100%	83,59%	95,1%	90,4%	90,40%	25,91%	25,91%	
26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Penderita diare yang ditangani				85%	100%	100%	100%	100%	84,70%	69,30%	99,00%	21,70%	31,90%	31,90%	
28	Angka kejadian malaria				NA	NA	NA	NA	NA	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	
29	Tingkat Kematian akibat malaria				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
31	Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
32	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi				0,00%	<0,51	<0,52	<0,53	<0,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
33	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
34	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS				100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
35	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				85,00%	85	85	85	85	85	85	78	86,16	92,25	92,25	

36	Cakupan kunjungan bayi				105,70%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	105,7	87,85	107,6	104,2	105,7	105,7	
37	Cakupan Puskesmas				133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	
38	Cakupan Pembantu Puskesmas				43,96%	43,96%	43,96%	43,96%	43,96%	43,96	43,96	54,1	59,7	59,7	59,7	
39	Cakupan kunjungan ibu hamil k4				84,80%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	84,80%	85,30%	88,70%	86,70%	68,60%	68,60%	
40	Cakupan pelayanan nifas				86,20%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	86,20%	78,30%	91,40%	85,60%	86%	86%	
41	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani				85,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	50,18%	39%	75,50%	85%	85%	
42	Cakupan pelayanan anak balita				72,30%	75,00%	80,00%	82,00%	84,00%	72,30%	77,52%	90,22%	85,60%	99,60%	99,60%	
43	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin				0,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
44	cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat				84,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,20%	93,20%	96,10%	93,30%	96,40%	96,40%	
45	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin				85,00%	85,00%	88,00%	90,00%	95,00%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	
46	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
47	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 telah menetapkan isu-isu strategis urusan kesehatan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal serta capaian kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan sebagaimana juga isu strategis pada Renstra Dinas Kesehatan yaitu ;

1. Angka kematian ibu (AKI)

Meskipun ada penurunan, angka kematian ibu masih cukup tinggi, mencerminkan tantangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan ibu.

2. Masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita.

Masih tingginya angka kematian bayi dan balita, yang menunjukkan potensi masalah dalam kualitas perawatan kesehatan maternal dan anak. Masih ditemuinya balita gizi buruk dan gizi kurang serta stunting

3. Angka Kematian Neonatal.

Angka kematian neonatal yang tidak menunjukkan penurunan signifikan dapat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perawatan neonatal.

4. Prevalensi Gizi buruk

Terdapat konsistensi dalam tingginya persentase balita yang mengalami gizi buruk, yang menunjukkan masalah dalam program gizi dan akses pangan yang memadai.

5. Rasio Tenaga Kesehatan yang Rendah.

Rasio dokter dan tenaga medis per penduduk yang rendah dapat menghambat akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

6. Cakupan Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Merata.

Beberapa cakupan pelayanan kesehatan seperti pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan kunjungan kesehatan ibu masih di bawah target, yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

7. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Rasio puskesmas dan rumah sakit per penduduk yang rendah dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan

8. Cakupan Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Merata

9. Keterbatasan pada Program Imunisasi.

Beberapa tahun belakangan menunjukkan cakupan imunisasi yang tidak optimal, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit.

10. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan secara optimal, termasuk penyediaan puskesmas pembantu pada setiap nagari
11. Masih tingginya prevalensi penyakit tidak menular dan penyakit menular  
Tingkat prevalensi tuberkulosis yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam deteksi, pengobatan, dan pencegahan penyakit menular
12. Belum terlaksananya Mutu Pelayanan Kesehatan secara optimal & berkesinambungan di Fasyankes.
13. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan  
Tingginya jumlah penyakit yang berbasis lingkungan menunjukkan masyarakat kurang peduli dengan kesehatan lingkungan
14. Masih tingginya resiko dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat  
Sering terjadinya bencana alam di kabupaten pesisir selatan yang dapat menyebarkan penyakit sehingga memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat .
15. Perencanaan dan monitoring evaluasi bidang kesehatan melalui beberapa mekanisme sehingga belum efektif.
16. Keterbatasan anggaran dalam menunjang operasional rumah sakit yang dapat menghambat pemeliharaan infrastruktur, pembelian peralatan medis, pelatihan SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan, pembayaran obat BMHP dan lain-lain

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan

anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

**TABEL T-C.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis kebutuhan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana /pagu indikatif
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah</b>	Kab. Pesisir Selatan	100%	112.357.045.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	100%	112.357.045.000
1	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</b>	Kab. Pesisir Selatan	10 dokumen	229.600.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	10 dokumen	229.600.000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Kab. Pesisir Selatan	10 dokumen	129.600.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	10 dokumen	129.600.000
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kab. Pesisir Selatan	24 dokumen	100.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	24 dokumen	100.000.000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	Kab. Pesisir Selatan	100%	85.400.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	100%	85.400.000.000
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Kab. Pesisir Selatan	14 bulan	83.000.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	14 bulan	83.000.000.000
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	2.400.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	2.400.000.000
4	<b>Peningkatan pelayanan BLUD</b>	<b>Ketersediaan operasional BLUD Puskesmas</b>	Kab. Pesisir Selatan	100%	25.000.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	100%	25.000.000.000
	1 Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	ketersediaan operasional BLUD Puskesmas	Kab. Pesisir Selatan	12 bln	25.000.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bln	25.000.000.000

5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Pesisir Selatan	100%	382.870.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	100%	382.870.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	10.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	10.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	24.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	24.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	15.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	15.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	5.400.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	5.400.000
5	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	Kab. Pesisir Selatan	12 bln	24.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bln	24.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	304.470.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	304.470.000
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pesisir Selatan	100%	369.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	100%	369.000.000
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	200.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	200.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kab. Pesisir Selatan	12 bln	169.000.000	DAU			Kab. Pesisir Selatan	12 bln	169.000.000

	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Kab. Pesisir Selatan	100%	725.575.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	100%	725.575.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	204.580.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	204.580.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	20.995.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	20.995.000
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	Kab. Pesisir Selatan	50%	500.000.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	50%	500.000.000
	8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel Puskesmas yang diadakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	250.000.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	250.000.000
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Puskesmas yang diadakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	250.000.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	250.000.000
II		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Visite rate Puskesmas	Kab. Pesisir Selatan	2,5	116.820.781.025	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	2,5	116.820.781.025
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang di rehab	Kab. Pesisir Selatan	3 unit	75.526.596.575	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	3 unit	75.526.596.575
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya	Jumlah bidang tanah yang diadakan dan dokumen lingkungan	Kab. Pesisir Selatan	1 bidang	2.000.000.000	DAU		Kab. Pesisir Selatan	1 bidang	2.000.000.000
	1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Kab. Pesisir Selatan	1 Unit	10.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	1 Unit	10.000.000.000

2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	2.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	2.000.000.000
3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pintu Gerbang RS Tapan yang dibangun	Kab. Pesisir Selatan	1 Unit	800.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	1 Unit	800.000.000
4	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang direnovasi	Kab. Pesisir Selatan	7 unit (Pusk Tj, Makmur, Tj, Beringin, Tapan, Rahul, Air Pura, Balai selasa dan Asam kumbang, dan Pustu	31.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	7 unit (Pusk Tj, Makmur, Tj, Beringin, Tapan, Rahul, Air Pura, Balai selasa dan Asam kumbang, dan Pustu	31.000.000.000
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Direhab	Kab. Pesisir Selatan	4 unit	2.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	4 unit	2.000.000.000
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang direhab	Kab. Pesisir Selatan	5 unit	1.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	5 unit	1.000.000.000
7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung diterima (Ambulance, Gendset, IPL, Air Bersih, Ambulance Roda 2)	Kab. Pesisir Selatan	57 unit	3.246.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	57 unit	3.246.000.000
8	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat Kesehatan yang diadakan	Kab. Pesisir Selatan	2 paket	17.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	2 paket	17.000.000.000
9	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Kab. Pesisir Selatan	2 paket	3.478.065.750	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	2 paket	3.478.065.750
10	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket Bahan Habis Pakai yang diadakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	2.802.530.825	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	2.802.530.825
11	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	50%	200.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	50%	200.000.000

2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPM Kesehatan yang mencapai target	Kab. Pesisir Selatan	90%	41.124.184.450	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	90%	41.124.184.450
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase K1 dan K4	Kab. Pesisir Selatan	100%	50.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	50.000.000
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	Kab. Pesisir Selatan	100%	4.210.588.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	4.210.588.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	Kab. Pesisir Selatan	100%	803.042.600	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	803.042.600
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan pada balita	Kab. Pesisir Selatan	100%	128.521.300	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	128.521.300
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase prasek dan usek yang diberikan pelayanan kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	128.721.300	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	128.721.300
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Kab. Pesisir Selatan	100%	394.067.100	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	394.067.100
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	130.271.300	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	130.271.300
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Kab. Pesisir Selatan	100%	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	100.000.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	Kab. Pesisir Selatan	100%	250.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	250.000.000

10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	Kab. Pesisir Selatan	100%	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	100.000.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan terduga tuberculosis	Kab. Pesisir Selatan	100%	69.085.500	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	69.085.500
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko HIV	Kab. Pesisir Selatan	100%	55.369.580	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	55.369.580
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase desa / nagari yang mengalami KLB/ wabah ditanggulangi < 24 jam	Kab. Pesisir Selatan	90%	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	90%	100.000.000
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	Persentase desa / nagari yang mengalami bencana ditanggulangi masalah kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	120.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	120.000.000
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk dan bumil KEK yang mendapat pelayanan kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.131.148.020	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	100%	1.131.148.020
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang membina pos UKK dan kelompok olah raga	Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	217.721.500	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	217.721.500
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen kajian lingkungan sehat	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	523.397.150	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	523.397.150
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	media promosi yang diadakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	134.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	134.000.000

19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan	Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	47.500.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	47.500.000
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mengadakan surveillance epidemiologi, pemantauan dan penanggulangan wabah	Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	150.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	150.000.000
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	50%	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	50%	100.000.000
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase institusi / sekolah yang mempunyai kebijakan KTR	Kab. Pesisir Selatan	20%	311.866.100	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	20%	311.866.100
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah event-event daerah dan Puskemas	Kab. Pesisir Selatan	10 event	4.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	10 event	4.000.000.000
24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Kab. Pesisir Selatan	28.760 peserta	608.860.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	28.760 peserta	608.860.000
25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	50%	12.500.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	50%	12.500.000.000
26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase deteksi dini Napza di sekolah	Kab. Pesisir Selatan	50%	125.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	50%	125.000.000
27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan berdasarkan target	Kab. Pesisir Selatan	1 bh	75.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	1 bh	75.000.000

	28	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah penghargaan kabupaten sehat	Kab. Pesisir Selatan	6 Puskesmas	400.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	6 Puskesmas	400.000.000
	29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan daerah terpencil	Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	1.750.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	20 Puskesmas	1.750.000.000
	30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Kab. Pesisir Selatan	80%	2.540.025.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	80%	2.540.025.000
	31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan SKDR dan alert yang direspon	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	120.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	120.000.000
	32	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD Tapan)	Ketersediaan biaya operasional RSUD Tapan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	750.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	750.000.000
	33	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Tapan)	Ketersediaan biaya operasional RSUD Tapan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	7.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	7.000.000.000
	34	Operasional Pelayanan Puskesmas	Ketersediaan biaya operasional Puskesmas	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	2.000.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	2.000.000.000
	3	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	120.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	120.000.000
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan yang dihasilkan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	120.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	120.000.000
	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK	Kab. Pesisir Selatan	10 Puskesmas	50.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	10 Puskesmas	50.000.000

	1	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Puskesmas yang memiliki persentase rujukan sesuai dengan standar KBK	Kab. Pesisir Selatan	10 Puskesmas	50.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	10 Puskesmas	50.000.000
III		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan</b>	<b>Kab. Pesisir Selatan</b>	<b>3000 orang</b>	<b>400.000.000</b>	<b>DAU, Pajak Rokok, DAK</b>			<b>Kab. Pesisir Selatan</b>	<b>3000 orang</b>	<b>400.000.000</b>
	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	300 orang	200.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	300 orang	200.000.000
	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin operasional Puskesmas, Rumah Sakit dan klinik kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	300 org	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	300 org	100.000.000
	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan yang dibina	Kab. Pesisir Selatan	800 Pegawai	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	800 Pegawai	100.000.000
	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	50 org	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	50 org	100.000.000
	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	Kab. Pesisir Selatan	50 org	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	50 org	100.000.000
	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	Kab. Pesisir Selatan	80 org	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	80 org	100.000.000
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	Kab. Pesisir Selatan	80 org	100.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	80 org	100.000.000
IV		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)</b>	<b>Kab. Pesisir Selatan</b>	<b>80 org</b>	<b>589.723.600</b>	<b>DAU, Pajak Rokok, DAK</b>			<b>Kab. Pesisir Selatan</b>	<b>80 org</b>	<b>589.723.600</b>
	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	Kab. Pesisir Selatan	20 depot	200.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK			Kab. Pesisir Selatan	20 depot	200.000.000

	1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat)	Kab. Pesisir Selatan	60%	200.000.000	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	60%	200.000.000
	2	Penerbitan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Jumlah sarana produsen industri rumah tangga pangan (IRTP) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan perizinan	Kab. Pesisir Selatan	80 sarana	311.355.340	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	80 sarana	311.355.340
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah sarana produsen industri rumah tangga pangan (IRTP) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan perizinan	Kab. Pesisir Selatan	80 sarana	311.355.340	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	80 sarana	311.355.340
	3	penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	Persentase TTU yang sesuai standar sanitasi	Kab. Pesisir Selatan	60%	389.723.600	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	60%	389.723.600
	1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	Persentase TTU yang sesuai standar sanitasi	Kab. Pesisir Selatan	60%	389.723.600	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	60%	389.723.600
V		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Nagari ber-PHBS</b>	Kab. Pesisir Selatan	8 kecamatan	556.074.196	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	8 kecamatan	556.074.196
	1	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah kecamatan yang menerapkan kebijakan hidup sehat	Kab. Pesisir Selatan	8 kecamatan	311.355.340	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	8 kecamatan	311.355.340
	1	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kecamatan yang menerapkan kebijakan hidup sehat	Kab. Pesisir Selatan	8 kecamatan	311.355.340	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	8 kecamatan	311.355.340
	2	Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan kegiatan KIE sesuai kriteria untuk menyebarkan informasi kesehatan dalam rangka peningkatan PHBS kabupaten	Kab. Pesisir Selatan	60%	244.718.856	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	60%	244.718.856
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan kegiatan KIE sesuai kriteria untuk menyebarkan informasi kesehatan dalam rangka peningkatan PHBS kabupaten	Kab. Pesisir Selatan	60%	244.718.856	DAU, Pajak Rokok, DAK		Kab. Pesisir Selatan	60%	244.718.856
		<b>TOTAL</b>				<b>231.157.273.225</b>					<b>231.157.273.225</b>

## 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2026.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2026 dengan tetap melihat batasan batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Kesehatan ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Pesisir Selatan bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan**  
**dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	ID USULAN	ANGGAL USU	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
1	1792297	10-01-2025	ERDIFAN	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	belum adanya gedung poskesri	Nagari Air Haji Tenggara, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
2	1792581	10-01-2025	ERDIFAN	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	belum adanya bangunan posyandu di nagari	Nagari Air Haji Tenggara, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
3	1792612	10-01-2025	ERDIFAN	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kondisi pustu yang belum ada pagarnya	Koto Gadang, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
4	1792760	10-01-2025	ERDIFAN	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	belum tersedianya Ambulan Nagari	Nagari Air haji Tenggara, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
5	1794091	10-01-2025	Muhammad Iqbal	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kayu Gadang	Kayu Gadang Tigo Koto, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Koto Nan Tigo Utara Surantih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
6	1796322	10-01-2025	NASRA, S.Sos, MM	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Nagari Jinang Kampung Pansur Belum memadai seperti sarana Prasarana Posyandu atau perlengkapan Posyandu seperti Meja dan kursi dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan Posyandu	Jinang Kampung Pansur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
7	1796849	10-01-2025	Basrijal	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ruangan Staf di Puskesmas Air Haji masih sedikit	Koto Panai , Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
8	1799538	10-01-2025	Aprizal	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Di butuhkan Penambahan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Rawang Gunung Malelo Surantih, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
9	1799608	10-01-2025	Aprizal	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Banyak Rumah Masyarakat yang Belum Memiliki WC	Rawang Gunung Malelo Surantih, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
10	1812793	13-01-2025	Deni Susila	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan PUSTU Nagari Kubu Tapan	Kampung Bukit Lengkuas, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kubu Tapan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda

11	1813552	13-01-2025	ZUDASROL,S.Pd	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kurang perlengkapan dipokesri nagari kapuh utara sehingga menyulitkan bidan desa untuk praktek di gedung pokesri	kampung sungai talang nagari kapuh utara , Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Kapuah Utara	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
12	1816957	13-01-2025	EDY WIBOWO	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak ada nya Pembangunan Poskesri untuk pusat kesehatan bagi warga nagari sungai sarik, serta kurangnya peralatan untuk menunjang kesehatan Ibu Hamil, Lansia, Balita dan masyarakat pada Umumnya	nagari sungai sarik, Sungai Limau, kab pesisir selatan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Silaut	Sungai Sarik	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
13	1820297	13-01-2025	Mahardicka, SH	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tidak adanya mobil Ambulan Desa sebagai sarana transportasi untuk berobat dan pengantaran jenazah bagi masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hiliie	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hiliie, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hiliie	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
14	1823674	13-01-2025	Nofriandi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Rumah Gizi : Disetiap pelaksanaan pemberian makannan anak stunting setiap tahunnya sangat sulit untuk mencari tempatnya karena tidak memiliki rumah gizi tetap.	Taluk Tigo Sakato, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	Taluk Tigo Sakato	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
15	1826788	13-01-2025	HANNAPI	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulance Nagari	Pasar Lama Muara Air Haji Pasar Lama, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Pasar Lama Muara Air Haji	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
16	1828572	14-01-2025	NASRA, S.Sos, MM	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan dan Posyandu Nagari Jinang Kampung Pansur	Jinang Kampung Pansur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
17	1828819	14-01-2025	NASRA, S.Sos, MM	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dibutuhkan penambahan BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Nagari Jinang Kampung Pansur	Jinang Kampung Pansur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
18	1828866	14-01-2025	NASRA, S.Sos, MM	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Banyak Rumah Masyarkat yang belum memiliki Jamban Sehat di Nagari Jinang Kampung Pansur	Jinang Kampung Pansur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
19	1829082	14-01-2025	Nofriedi, SH	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Karena Masih kurang sarana dan prasarana posyandu lansia di Nagari Koto Nan Toigo IV Koto Hiliie	Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hiliie, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	Koto Nan Tigo IV Koto Hiliie	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
20	1829196	14-01-2025	ZAINIL IDRUS	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Minimnya pralatan kesehatan untuk fasilitas pelayanan masyarakat,seperti Lansia, Balita,	Nagari IV Koto Mudiek, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	IV Koto Mudiek	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
21	1830907	14-01-2025	Roza Adelina, SH	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dibuhkan fasilitas puskesri di kampung yang belum memiliki puskesri	Teluk betung, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	IV Koto Hiliie	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
22	1830969	14-01-2025	Roza Adelina, SH	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diperlukan pembanguna puskesri untuk kampung yang belum memiliki poskesri	Limau Sundai, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	IV Koto Hiliie	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda

23	1834363	14-01-2025	Syatrial	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurang lengkapnya alat kesehatan Postu untuk penunjang pelayana kesehatan masyarakat	Bukik Kaciak, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	IV Jurai	Bukik Kaciak Lumpo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
24	1838539	14-01-2025	Suroto	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	belum memiliki gedung posyandu di kampung Tanjung Beringin IV dan Kampung Tanjung Beringin V	Tanjung Beringin IV dan Kampung Tanjung Beringin V, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Lunang	Lunang Selatan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
25	1842732	14-01-2025	ANITAFRIA SAFRI,SH	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Supaya Pelayanan Untuk Masyarakat Supaya Meningkatkan	Muaro Pulau Karam, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Pulau Karam Ampang Pulaui	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
26	1843682	14-01-2025	Amsuardi	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dengan melakukan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, nanti harapannya dapat meningkatkan kesehatan dikalangan masyarakat, agar jauh dari penyakit-penyakit yang akan menjangkiti di usia senja, dan dapat hidup terus sehat di masa tua.	Nagari Surantih, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Surantih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
27	1843741	14-01-2025	Iwal, S.Pt	Kelurahan / Desa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	Bantuan Perlengkapan Alat-alat Kesehatan Pustu Pasar Amping Parak	Kampung Pasar Amping , Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Amping Parak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
28	1843915	14-01-2025	Amsuardi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	alat kesehatan dan fasilitas pelayanan di Poskesri yang ada di Nagari Surantih, masih jauh dari kata cukup, karena tidak adanya bantuan dari Dinas Kesehatan untuk melengkapi Fasilitas yang layak untuk masyarakat di Poskesri Nagari Surantih, sedangkan Nagari Surantih memiliki 3 Unit Poskesri yaitu Poskesri Sungai Sirah, Samudera dan Gunung Rajoyang sudah ada Bidan Desa nya di tunjuk oleh Dinas Kesehatan, namun fasilitas sangat kurang, sehingga ini perlu secepatnya di Penuhi Fasilitas Kesehatannya	Nagari Surantih, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Surantih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
29	1850161	15-01-2025	Amsuardi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pagar di Puskesmas Surantih belum ada, yang ada hanya pagar lama yang sudah banyak reyot dan bolong-bolong, sehingga kadang untuk pengunjung puskesmas merasa tidak nyaman, karena dapat membahayakan para pasien dan anak-anak yang nantinya berkunjung ke puskesmas untuk berobat	Kampung Pasar Surantih, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Surantih	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
30	1854588	15-01-2025	SUHARDI, A.Md. Kep	Kelurahan / Desa	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Seringnya terlantar masyarakat dalam penanganan Kesehatan Ibu Hamil Melahirkan karena jarak yang jauh dengan rumah sakit	Seberang Tarok Nagari Lakitan Selatan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Lengayang	Lakitan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
31	1855272	15-01-2025	Sionli	Kelurahan / Desa	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	BELUM ADA NYA GEDUNG RAWAT INAP	KAMPUNG AIR MATI , Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Muara Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda

32	1858252	15-01-2025	Lazuardi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ruang Rawat Inap PUSKESMAS Koto Berapak sangat panas sehingga membutuhkan AC	Kamp. Koto Berapak, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Bayang	Koto Berapak	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
33	1858340	15-01-2025	Lazuardi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak ada tempat Parkir di PUSKESMAS Koto Berapak	Kamp. Koto Berapak, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Bayang	Koto Berapak	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
34	1858617	15-01-2025	SABARUDDIN, S.IP	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	masih kurangnya alat keehatan yang ada di poskesri	Sungai Sirah Hilir, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirah Air Haji	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
35	1858803	15-01-2025	Sionli	Kelurahan / Desa	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	BELUM ADA NYA AMBULAN	KAMPUNG AIR MATI, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Muara Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
36	1858898	15-01-2025	Sionli	Kelurahan / Desa	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	PAGAR PUSKESMAS BELUM MEMADAI RUSAK	KAMPUNG AIR MATI, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Muara Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
37	1860037	15-01-2025	ZAINAL, S.Ag	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Untuk mencegah gizi buruk atau Stunting pada balita perlu sekali mengadakan Pelaksanaan Pos Gizi dinagari agar meningkatkan satus gizi balita dengan pemberian makanan tambahan (PMT)dll, yang memerlukan kerja sama semua pihak.	Kampung Koto Panjang dan Jaruai Durian Kadok, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Timur	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
38	1884041	16-01-2025	Hengki Gunawan Sastra, S.Pd.I	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Balai Selasa	Balai Selasa, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Ranah Pesisir	Pelangai	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
39	1899253	17-01-2025	Mulyadi	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Lingkungan yang tidak bersih	Amping Parak Timur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Amping Parak Timur	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
40	1903201	17-01-2025	Mawardi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya sarana dan prasana alat alat posyandu	KOTO PANJANG dan KOTO MERAPAK, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
41	1914728	17-01-2025	DEDI CANDRA	Kelurahan / Desa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	belum adanya pagar SD 06 Airpura	Palokan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Palokan Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
42	1918467	17-01-2025	Nopen Hendri	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Poskesri Nagari.	Lansano, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Lansano Taratak	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda

43	1919051	17-01-2025	Nopen Hendri	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Odong-odong Balita Ke Posyandu.	Nagari Lansano Taratak, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Lansano Taratak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
44	1919072	17-01-2025	Nopen Hendri	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulance Nagari.	Nagari Lansano Taratak, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Sutera	Lansano Taratak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
45	1927465	18-01-2025	Syafrijal	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Alat Kesehatan	Punggasan Timur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Punggasan Timur	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
46	1955133	20-01-2025	Syahmiyardi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penuntasan 37 KK yang terindikasi Stunting sangat diperlukan untuk mengurangi angka stunting di Nagari	Kampung Tuik, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	Tuik IV Koto Mudiek	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
47	1971255	21-01-2025	DEDI CANDRA	Kelurahan / Desa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	Masyarakat masih kekurangan air	Palokan Inderapura, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Palokan Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
48	2030143	23-01-2025	DEDI JOAFNALDI, S.SOS.I	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nagari Tluk Kualo jauh dari pusat kegiatan, selain itu tidak semua jalan Nagari Tluk Kualo yg beraspal, di tambah jembatan penghubung antar kecamatan Rusak, jika ada Masyarakat Nagari Tluk Kualo yang sakit dan keadaan Darurat, maka keluarga akan panik menuju puskesmas yang di karena kan Jalan harus mutar ambulance tidak ada, jika menghubungi Ambulance dari Nagari Tetangga, maka butuh waktu yang agak lama. maka dari itu penulis mengusulkan Pengadaan Ambulance	Tluk Kualo Inderapura, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Tluk Kualo Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
49	2030470	23-01-2025	DEDI JOAFNALDI, S.SOS.I	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nagari Tluk Kualo tidak memiliki Tempat sampah yg khusus, maka dari itu sampah-sampah berserakan di rumah-rumah dan tempat umum. Untuk kebersihan lingkungan maka Penulis mengusulkan Pengadaan mobil Pengangkut Sampah.	Tluk Kualo Inderapura, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Tluk Kualo Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
50	2030875	23-01-2025	DEDI JOAFNALDI, S.SOS.I	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Untuk Kebersihan Lingkungan dan kesehatan maka penulis mengusulkan Pengadaan MCK Warga Kurang Mampu.	Tluk Kualo Inderapura, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Tluk Kualo Inderapura	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
51	2031255	23-01-2025	DEDI JOAFNALDI, S.SOS.I	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Masyarakat Nagari Tluk Kualo masih banyak yg belum memiliki Rumah, kadang kala mereka ngontrak, jika penghasilannya cukup, Tinggal di rumah mertua, bahkan ada yang menumpang di rumah orang, maka dari itu penulis mengusulkan Pembangunan Rumah Tidak Layak huni.	Tluk Kualo Inderapura, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Tluk Kualo Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
52	2199378	04-02-2025	ATRIN JABAR	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kegiatan layanan Gizi stunting anak dan Ibu hamil KEK tidak memiliki pos yang sangat penting agar kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan nyaman.	Kampung Cerocok Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Cerocok Anau Ampang Pulai	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda

53	2203557	04-02-2025	ATRIN JABAR	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dibutuhkan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir untuk mencegah ibu hamil dan bayi yang terkendala saat membutuhkan penanganan kesehatan.	Kampung Cerocok Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan	Cerocok Anau Ampang Pulai	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
54	2272902	10-02-2025	ZAINIL IDRUS	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya Fasilitas sarana dan prasarana posyandu di Nagari IV KOTO MUDIEK	IV KOTO MUDIEK, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Batang Kapas	IV Koto Mudiek	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
55	2348701	14-02-2025	Basrijal	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Aula Puskesmas Air Haji karena Puskesmas Air Haji belum ada	KOTO PANAI, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
56	2348781	14-02-2025	Basrijal	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penambahan Ruang Rawat Inap Puskesmas Air Haji karena Ruang di Puskesmas masih Kurang	KOTO PANAI, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
57	2427625	24-02-2025	Feby Oktafianto	Kelurahan / Desa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	Adanya Kelompok Perempuan yang Memiliki Kemampuan yang Kekurangan Fasilitas	Nagari Air Haji Barat, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Linggo Sari Baganti	Air Haji Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
58	2432736	25-02-2025	MARFEN ROSADI,ST	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan PUSTU hal ini dikarenakan saat ini di Nagari Kami tidak ada memiliki Fasilitas kesehatan	kampung lubuk betung hilir, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
59	2434051	25-02-2025	BUSTAMI	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya fasilitas kesehatan di Nagari Bukit Buai	Rawang Bubur, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai Tapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
60	2437832	26-02-2025	ALI MARTOPO	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	masyarakat nagari riak danau banyak mengeluh tentang ambulance karena mahal. maka nagari riak danau mengajukan pengadaan ambulance untuk masyarakat kurang mampu	nagari riak danau tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
61	2441019	26-02-2025	DEDI CANDRA	Kelurahan / Desa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	Belum ada pustu	Palokan Inderapura, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Airpura	Palokan Inderapura	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
62	2444276	27-02-2025	JONI EVENDI, A.Md	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	sering terjadinya bencana dan ambulan dipuskesmas hanya ada 1, maka kami sangat butuh pengadaan ambulan	Nagari batang betung tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
63	2444672	27-02-2025	JONI EVENDI, A.Md	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tidak mampunya masyarakat miskin untuk membayar BPJS mandiri, maka perlu pengadaan BPJS PBI	nagari batang betung tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda

64	2445376	27-02-2025	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	agar bisa membantu masyarakat nagari koto anau tapan yang apabila terkena musibah bisa cepat untuk ditangani	Nagari Koto Anau Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Pengajuan Usulan
65	2445608	27-02-2025	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulan Nagari, supaya masyarakat yang apabila terkena musibah dan sakit bagi keluarga yang tidak mampu bisa cepat untuk ditangani dan dibawa ke rumah sakit	Nagari Koto Anau Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
66	2445858	27-02-2025	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Karena Masih Banyak Masyarakat Nagari Koto Anau Tapan Tidak Memiliki BPJS Kesehatan	Nagari Koto Anau Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
67	2446549	27-02-2025	ENDI CANSER	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Seringnya ditemukan Kendala Kesehatan Pada Ibu Hamil Dan Balita, Maka sangat Dibutuhkan Pelayanan Kesehatan Untuk Ibu Hamil dan Balita	Pasar Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda
68	2447977	28-02-2025	ALHADI	Kelurahan / Desa	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	MCK SD 01 Pengantingan tidak layak digunakan dan sangat dibutuhkan oleh Siswa	Kampung Pengantingan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Arah Tapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	Validasi Mitra Bappeda
69	2448043	28-02-2025	ALHADI	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jauhnya Jarak Tempat Pelayanan Kesehatan maka sangat perlu Mobilisasi untuk menuju ke tempat Pelayanan Kesehatan (Bantuan Mobil Ambulan)	Batang Arah Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Arah Tapan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	Validasi Mitra Bappeda

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SEKWAN	VOLUME	SATUAN
1	1513924	22-03-2025	IT ARMAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Banyaknya lantai puskesmas yang rusak sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan	Jalan baru IV bukit tambun tulang kenagarian koto hille, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	ok	1	unit
2	1514015	22-03-2025	IT ARMAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kurang SDM tentang upaya kesehatan	Kecamatan batang kapas, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	ok	1	paket
3	1514083	22-03-2025	IT ARMAN	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kurangnya peralatan kesehatan di puskesmas dan puskestri	Kecamatan Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	ok	1	paket
4	1539756	27-03-2025	DANI SOPIAN, S.H.	Pembangunan Puskesmas	Perlu nya pembangunan Puskesri di Nagari Inderapura Tengah	Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	300	Juta
5	1565129	08-04-2025	ZAINAL ARIPIN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Perlu adanya parkir di Puskesmas Linggo Sari Baganti	Puskesmas Linggo Sari Baganti Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	-	00
6	1568382	09-04-2025	HAKIMIN, S.H	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulan	lunang, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	PUSKESMAS KOTO BARU	-	300	Juta
7	1568522	09-04-2025	MUSMULLIYADI KUTAI, S.H.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bantuan alat untuk Fasilitas Kesehatan	Silaut, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	50	Juta
8	1571923	10-04-2025	GUSMEN, S.Sos	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Makanan Tambahan Bayi dan Balita	Kec. IV Jurai dan Batang kapas, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	200	juta
9	1578528	12-04-2025	ANDRA RESPATI	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medis puskesmas barung belantai	Barung-barung belantai, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	100	juta
10	1580362	13-04-2025	IEL FAUZI ANWAR	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan pagar Pustu kp. Tampuniak kambang timur, Lengayang	kp. Tampuniak kambang timur, Lengayang, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	200	JUTA
11	1582025	14-04-2025	ANANG BINTORO, ST	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PENGADAAN SARANA PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	150	Juta
12	1583451	14-04-2025	ARDIUL	PRASARANA PELAYANAN KESEHATA	Perlunya Pengadaan Ambulance Di Postu (Puskesmas Pembantu) Pasar Ampiang Parak, Kecamatan Sutera	Pasar Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	200	juta
13	1583528	14-04-2025	IT ARMAN	PRASARANA PELAYANAN KESEHATA	Perlunya Pengadaan Ambulance di Postu (Puskesmas Pembantu) Ampek Koto Hiller	Batang kapas, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	ok	200	juta
14	1583560	14-04-2025	GUSMEN, S.Sos	PRASARANA PELAYANAN KESEHATA	Perlunya Pengadaan Ambulance di Postu ( Puskesmas Pembantu )	Kec. IV Jurai dan Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	300	juta
15	1583799	14-04-2025	IKAL JONEDI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PEMBUATAN PAGAR PUSKESMAS SURANTIH.	SURANTIH., Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	1	Paket
16	1584482	14-04-2025	DARMANSYAH	Pembangunan Puskesmas	Perbaikan Loteng, Rolling Door, Gudang Farmasi dan Poliklinik	Puskesmas Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	ok	100	Juta
17	1584485	14-04-2025	DARMANSYAH	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Mobiller dan Elektronik Kesehatan	Puskesmas Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	ok	100	Juta
18	1584487	14-04-2025	DARMANSYAH	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembuatan taman RSUD Tapan	RSUD Pratama Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	ok	200	Juta
19	1584512	14-04-2025	PARDIS, A.Md	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Masih Banyaknya Masyarakat yang Bekerja Belum Mempunyai BPJS Kesehatan	Kec.Ranah Pesisir dan Kec.Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	200	JUTA
20	1585009	15-04-2025	APRINAL TANJUNG, SH, Dt. Rajo Moleh	PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Perlunya Pengadaan Ambulance di POSTU( Puskesmas Pembantu ),PENGADAAN AMBULANS UNTUK MESJID DAN MUSHOLLA	IV JURAI DAN BATANG KAPAS, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	2	Unit
21	1585161	15-04-2025	BASUANTI ILYAS, S.E.	PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Perlunya pengadaan Ambulance di POSTU ( Puskesmas Pembantu) Pengadaan ambulan utk mesjid/mushala	Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	250	juta
22	1586861	15-04-2025	RONI ADE PUTRA	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Ambulance untuk masyarakat	Nagari Punggasan, Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	200	JUTA

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak terlepas dari penetapan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan yaitu “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta sesuai dengan kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDGs)* bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran SDGs 2030”. Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
2. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Penyelidikan Epidemiologi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB melalui deteksi dini KLB;
3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, fokus prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan didukung oleh pelaksanaan strategi pembangunan kesehatan yaitu upaya peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan termasuk penyediaan vaksin, penyediaan sumberdaya kesehatan, penyediaan peralatan kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui strategi pembangunan kesehatan, melalui beberapa strategi pembangunan kesehatan, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan;
- b. Pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah;
- c. Penguatan peraturan perundang undangan pembangunan kesehatan;
- d. Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi komprehensif dan pengembangan jejaring;

- e. Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat;
- f. Peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang *cost effective*;
- g. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif;
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil;
- i. Peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk indikator SPM dan *Universal coverage*;
- j. Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan;
- k. Pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta;
- l. Peningkatan efektivitas dan efisien penggunaan anggaran;
- m. Peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- n. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola upaya kesehatan yang baik (*good governance*);
- o. Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- p. Peningkatan manajemen kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- q. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan;
- r. Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- s. Peningkatan pemantauan surveillance gizi;
- t. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk UKBM;
- u. Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti jaminan kesehatan masyarakat (JKN) melalui BPJS

### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2026**

Penetapan tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam rencana kerja (RENJA) OPD Dinas Kesehatan untuk Tahun 2026 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan Dinas Kesehatan Tahun 2025 s/d 2029 adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat ”** dengan indikator meningkatkan Indeks Keluarga sehat dari 0,343 di tahun 2024 menjadi 0,5 pada tahun 2030, yang merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KET
				2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(07)	(12)
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN</b>					
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada		Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0,43	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup) (Angka)	97	
			Prevalensi Stunting (%)	23	
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (Treatment)	95	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	94	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Angka)	81	
Meningkat Kualitas Inovasi Perangkat	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Nilai)	91			

### 3.2. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu **“Pesisir Selatan tumbuh, Maju dan Berkelanjutan”** maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 terdiri dari :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dan pelayanan administrasi termasuk kegiatan perencanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan dan 21 Puskesmas yang ada (administrasi

keuangan, perencanaan dan aset) dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 21 Puskesmas. Di dalam Program ini ada 10 kegiatan dan beberapa sub kegiatan yang dapat dirinci dibawah ini:

- 1.1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat, dengan sub kegiatan :
  1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
  1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
  5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.9 KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI
  1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 1.10 Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :
  1. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

## **2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas Kesehatan dan pelaksanaan SPM Kesehatan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Di dalam Program ini ada 4 Kegiatan dan banyak Sub Kegiatan yang dapat dirinci dibawah ini :

- 2.1 Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukp dan ukm kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
  1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

2. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  4. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  5. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  6. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
  7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
  8. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2.2 kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
  6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
  7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
  8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
  10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
  11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberculosis
  12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
  13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
  14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
22. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
23. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
24. Operasional Pelayanan Puskesmas
25. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
26. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota
27. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
28. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
29. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
31. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
32. Pengelolaan Layanan Imunisasi

### 2.3 KEGIATAN PENYELENGGARAAN SIK SECARA TERINTEGRASI

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

### 2.4 Kegiatan penerbitan izin rs kelas c,d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

### **3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Program ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pelatihan-pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansi/unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, dan uji kompetensi. Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi tenaga Kesehatan. Di dalam Program ini terdapat 2 Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### **3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

#### **3.2 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standa
3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### **3.2 Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sdm kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :**

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**

Program ini bertujuan agar terpantaunya IRTP, Apotik, dan Toko Obat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Program ini mempunyai indikator yaitu Jumlah IRTP yang mendapatkan penyuluhan PKP Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Toko Obat). Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 4.1 Kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan sub kegiatan :
  1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 4.2 Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan irt dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT, dengan sub kegiatan :
  1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat di Produksi oleh IRT
- 4.3 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dengan sub kegiatan :
  1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

#### **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kader posyandu dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kesehatan serta penyediaan media promosi dan informasi kesehatan. Dalam program ini terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- 5.1 kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan PSM dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
  1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5.2 Kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
  1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- 5.3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- 5.4 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan Masyarakat (UKBM)

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS KESEHATAN</b>						<b>212.074.387.701,00</b>						<b>243.151.700.000,00</b>		
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>212.074.387.701,00</b>							<b>243.151.700.000,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>212.074.387.701,00</b>							<b>243.151.700.000,00</b>	
1.	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>151.768.086.973,00</b>						-	<b>182.404.700.000,00</b>	
		[ Meningkatkan Tata Kelola Organisasi ]	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	80.81	81	81	151.768.086.973,00	-	-	-	-	-	-	182.404.700.000,00	-
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	84	91	91	91									
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	156.575.456,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	147.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21 Dokumen	65.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	91.575.456,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		92.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	---	-------------------------	---	---	---	--	---------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	149.807.298.083,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	180.410.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1200 Orang/bulan	149.398.597.945,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		180.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				21 Dokumen	329.555.428,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	79.144.710,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	---	-------------------------	---	---	---	--	---------------	-----------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	118.119.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				21 Dokumen	81.391.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		82.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	36.727.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	153.684.518,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				21 Dokumen	45.450.518,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	108.234.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	236.608.811,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	248.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.357.822,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.204.310,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.001.067,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				21 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	32.525.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	91.842.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		92.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	28.278.112,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	525.642.465,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	545.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				21 Unit	39.190.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit	234.988.415,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	248.464.050,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				21 Unit	3.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	508.358.810,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	248.989.936,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	259.368.874,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.872.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	233.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	13.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	215.872.800,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	32.927.030,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				21 Dokumen	32.927.030,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						58.727.172.509,00						-	59.156.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ]	Cakupan penemuan kasus TB Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 tahun Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	100 1315 23.4 32.55 7.474 75.80 88 89	100 12.40 1368 20 23.4 45.60 65.4 76.83	100 12.4 20.22 23.4 45.63 64.78 84	100 11.4 2050 23 23.4 30.45 65.66 80.85	58.727.172.509,00	-	-	-	-	-	-	59.156.000.000,00	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.577.242.353,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-	-	19.840.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				21 Unit	5.573.454.355,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				21 Unit	1.169.272.586,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				21 Unit	446.803.980,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	12.250.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1000 Keluarga	34.786.700,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	102.924.732,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	38.927.167.604,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	39.090.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10733 Orang	150.244.200,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	213.198.540,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	18.559.885,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	49.007.100,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	36.797.750,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	115.951.950,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	65.659.850,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	51.529.600,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	58.837.300,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1081 Orang	31.351.300,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	55.135.940,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				360 Orang	40.566.290,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	167.079.700,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	167.079.700,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	89.141.802,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	194.100.498,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	266.880.400,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	54.200.200,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	205.267.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	370.342.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	35.163.140.857,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		35.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	117.375.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	187.841.118,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	492.129.635,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				12 Unit	75.777.484,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	33.058.990,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	19.818.740,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				12 Tatanan	65.284.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	20.746.825,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	242.548.700,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	28.514.250,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	71.915.706,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	71.915.706,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.846.846,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				21 Unit	80.362.646,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		82.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				21 Dokumen	70.484.200,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.340.709.220,00						-	1.346.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kesehatan ]	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan Mutunya Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	5.5 60 90 91	12 5.2 60 63	17 5.3 65 67	22 5.3 70 71	1.340.709.220,00	-	-	-	-	-	-	1.346.000.000,00	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	105.936.020,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	108.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				21 Dokumen	42.518.400,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		43.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				21 Dokumen	63.417.620,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-				-	235.329.300,00				-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-			238.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					21 Dokumen	17.430.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-				18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					36 Orang	173.314.250,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-				175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					21 Dokumen	44.585.050,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-				45.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				999.443.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					36 Orang	999.443.900,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							85.498.199,00						-	87.000.000,00	
		[ Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ]	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	40	10	12	15	85.498.199,00	-	-	-	-	-	-	-	87.000.000,00	-
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	55	25	30	35										
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	70	40	45	50										
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar	75	50	55	60										
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	80													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-				44.412.999,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					21 Dokumen	44.412.999,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-					31.500.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					21 Dokumen	31.500.200,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	32.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-				9.585.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				21 Dokumen	9.585.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>						<b>152.920.800,00</b>						-	<b>158.000.000,00</b>	
		[ Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ]	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	75	17.63	40	45	152.920.800,00	-	-	-	-	-	-	158.000.000,00	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				24.621.750,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				21 Dokumen	24.621.750,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.244.150,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-	-	48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				21 Dokumen	26.614.600,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1000 Keluarga	18.629.550,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	83.054.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	85.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				21 Dokumen	83.054.900,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	<b>J U M L A H</b>							<b>212.074.387.701,00</b>								<b>243.151.700.000,00</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

#### **KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan pada tabel 3.2 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan arah kebijakan tahun 2026 dalam RPJMD adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, program Prioritas Dinas Kesehatan tahun 2026 adalah Program Kesehatan ibu dan anak yang setiap tahunnya Angka Kematian ibu dan bayi menjadi isu-isu di bidang kesehatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026, RENJA ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.